

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Muhsin, L. N. (2019). *Surat Kekancangan Tanah Sultan Ground "Upaya Mendapatkan Izin Memanfaatkan Tanah Kraton Yogyakarta"*. Yogyakarta: Deepublish.
- Anggarawati, F. A. (2019). Berebut Kendali atas Tanah Baluwarti: Kontestasi Pemerintah Kota Surakarta dan Kasunanan Surakarta atas Tanah Kasultanan dalam Perspektif Game Theory. *Jurnal Polgov Vol.1 No.1*, 329-362.
- Antonio, D. A. (2021). Legalisasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Riau Law Journal: Vol. 5, No. 1*, 1-13.
- Berlian Saudi, D. s. (2002). *Legitimasi dan suksesi (studi tentang dasar hubungan rakyat dan penguasa dalam sejarah politik Jawa abad XV-XVI)*. Yogyakarta: Thesis Universitas Gadjah Mada.
- Dardias, B. (2009). Yogyakarta in Decentralized Indonesia: Integrating Traditional Institution in Democratic Transitions. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 13, Nomor 2*, 190-203.
- Dardias, B. (2016). Menyiapkan Sultan Perempuan: Legitimasi Langit dan Efektivitas Rezim Sultan Hamengkubuwono X. *Masyarakat Indonesia*, 31-49.
- J. Dowling, J. P. (1975). Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behavior. *Pacific Sociological Review*, 18: 122-136.
- Karjoko, L. (2009). Budaya Hukum Keraton Surakarta dalam Pengaturan Tanah Baluwarti sebagai Kawasan Cagar Budaya. *Mimbar Hukum Volume 1, Nomor 21*, 35-52.
- Kominfo.go. (2018). *Program PTSL Pastikan Penyelesaian Sertifikasi Lahan Akan Sesuai Target*. Retrieved from Program PTSL Pastikan Penyelesaian Sertifikasi Lahan Akan Sesuai Target:

https://www.kominfo.go.id/content/detail/12924/program-pts1-pastikan-penyelesaian-sertifikasi-lahan-akan-sesuai-target/0/artikel_gpr

Laksono, M. Y. (2022). *Sekitar 25 Juta Bidang Tanah di Indonesia Belum Bersertifikat, Kapan Rampung?* Retrieved from <https://www.kompas.com/properti/read/2022/12/01/173223621/sekitar-25-juta-bidang-tanah-di-indonesia-belum-bersertifikat-kapan>

Landman, T. (2000). *Issues and Methods in Comparative Politics-An Introduction*. New York: Routledge 270 Madison Avenue.

Maurer, J. (1971). *Readings in organizational theory: Open system approaches*. New York: Random House.

Munsyarief. (2013). *Menuju Kepastian Hukum Atas Tanah: Kasultanan Dan Pakualaman Di Daerah Istimewa*. Yogyakarta: Ombak CV.

Ruhyanto, A. (2021). *Building State Legitimacy Through Territorial Reform: Pemekaran in Papua Indonesia*. Thesis University of Birmingham.

Ruhyanto, A. (2023). *Pengantar Kajian Kekuasaan*. Yogyakarta: Fisipol UGM.

Sardiman. (1992). Konsep Kekuasaan dalam Tradisi Budaya Jawa. *Cakrawala Pendidikan, Nomor 1, Tahun IX*, 81-94.

Suchman, M. (1995). Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches. *Academy of Management Review Vol 20*, 571-611.

Sukisno, D. (2014). *Pengelolaan Tanah Kasultanan (Sultan Grond) Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Thesis UGM.

Sulistyaningsih, R. (2021). Reforma Agraria di Indonesia. *Jurnal Perspektif Volume 26 Nomor 1*, 57-64.

Tempo.co. (2016). *Tanah Milik Keraton Yogya di Sleman Mencapai 746 Hektare*. Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/764450/tanah-milik-keraton-yogya-di-sleman-mencapai-746-hektare>

Tolo, E. (2013). Dari Otokrasi Ke Demokrasi: Menyibak Sejarah dan Survivalitas "Demokrasi Ala Daerah Istimewa Yofyakarta". *Jurnal Humaniora Volume 25 Nomor 3*, 270-280.

Widyatmoko. (2007). *Proses urbanisasi perdesaan di Daerah istimewa Yogyakarta dan urbanisasi di Indonesia yang melatarbelakanginya*. Yogyakarta: Thesis Universitas Gadjah Mada.

Tinjauan Undang-undang:

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Percepatan Program Nasional Agraria Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap